

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Upaya Tiongkok Melindungi *Intellectual Property* Secara Internal

Melihat perkembangan kasus pelanggaran terhadap *intellectual property* didalam negeri yang semakin meningkat, membuat Tiongkok terus berupaya melakukan tindakan untuk melindungi dan memagari *intellectual property*. Fenomena yang terus terjadi mengakibatkan beberapa perusahaan yang berinvestasi di Tiongkok mengalami kerugian, pihak pemerintah tidak tinggal diam karena mereka tidak menginginkan investor besar takut berinvestasi di Tiongkok. Berdasarkan laporan investasi dunia tahun 2017 yang dipublikasikan oleh UNCTAD Tiongkok menduduki peringkat penerima FDI terbesar ketiga didunia setelah A.S dan Inggris

Dengan tingkat laju perekonomian negara yang pesat Tiongkok berhasil menduduki peringkat kedua yang paling banyak menarik bagi investor perusahaan multinasional untuk tahun 2017-2019, setelah Amerika Serikat. Penyerapan FDI merupakan salah satu kunci kebijakan yang membuka pasar Tiongkok ke dunia luar. Pada tahun 2016, arus masuk FDI mencapai USD 133 miliar, tidak jauh dari titik tertinggi sebesar USD 135 miliar pada tahun 2015. FDI mengalir dari Tiongkok ke luar negeri, senilai USD 183 miliar pada tahun 2016, melampaui arus FDI ke negara tersebut. Tiongkok memiliki pasar besar yang berkembang pesat, dan tidak terlalu terpengaruh oleh krisis keuangan. Negara ini merupakan basis produksi rendah namun memiliki tingkat hubungan karyawan dan mitra dagang yang sangat kuat. Ada beberapa faktor dapat menghambat investasi di Tiongkok seperti

kurangnya transparansi, ketidakpastian hukum, tingkat perlindungan hak kekayaan intelektual, korupsi atau tindakan proteksionis sangat rendah yang menguntungkan bisnis lokal (en.portal.santandertrade.com). Berikut beberapa tabel yang menunjukkan FDI Tiongkok yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya investor.

Tabel 3.1 Investasi Asing Langsung di Tiongkok

Foreign Direct Investment	2014	2015	2016
FDI Inward Flow (million USD)	128,500	135,610	133,700
FDI Stock (Million USD)	1,085,293	1,220,903	1,354,404
Number Of Greenfield Investment***	1,080	876	800
FDI Inwards (in% of GFCF****)	2,7	2,8	2,8
FDI Stock (in% of GDP)	10,3	10,9	12,1

Sumber : UNCTAD

Tabel 3.2 Negara Investor Asing di Tiongkok

Main Investing Countries	2016, in %
Hongkong	69,0
Singapore	5,0
South Korea	4,0
US	3,0
Macao	3,0
Taiwan	3,0
Japan	3,0
Germany	2,0
UK	2,0
Luxembourg	1,0

Sumber : www.fdi.gov.cn

Tabel 3.3 Sektor Investasi di Tiongkok

Main Invested Sector	2016, in %
Manufacturing	43,2
Real Estate	20,9
Bussiness services and renting	6,2
Wholesale and Retail Trade	5,7
Transport,Storage,Telecommunication and Postal Service	2,0

Sumber : www.fdi.gov.cn

3.1.1. Hukum Tiongkok tentang *Intelelctual Property*

Tiongkok memiliki hukum terkait IPR yang berfungsi untuk melindungi dan mengawasi di bawah sistem hukum perdata. IPR atau hak atas kekayaan intelektual (HKI) dilindungi secara konstitusional sesuai dengan konstitusi. Dewan negara membuat undang-undang untuk melindungi hak kekayaan intelektual termasuk hukum paten, hukum hak cipta, hukum merek dagang, perlakuan tidak sehat tentang hukum persaingan, peraturan tentang perlindungan varietas tanaman yang baru, dan lain-lain. Departemen administratif yang relevan juga telah memberlakukan berbagai peraturan yang melindungi hak kekayaan intelektual. Beberapa hukum di Tiongkok yang meliputi hukum perdata, hukum pidana maupun hukum perdagangan luar negeri dan interpretasi yudisial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung juga termasuk peraturan khusus tentang perlindungan IPR.(Becker, 1968)

Berikut ini tabel yang menunjukkan hukum di Tiongkok mengenai dengan IPR:(Zhang, 2006)

Tabel 3.4. Daftar Peraturan Hukum dan Regulasi Administrasi IPR di Tiongkok

Trademark Law of the People's Republic of China	Effective Date: March 1, 1983 First Amendment Date: February 22, 1993 Second Amendment Date: October 27, 2001
Patent Law of the People's Republic of China	Effective Date: April 1, 1985

	<p>First Amendment Date: September 4, 1992</p> <p>Second Amendment Date: August 25, 2000</p>
Copyright Law of the People's Republic of China	<p>Effective Date: June 1, 1991</p> <p>First Amendment Date: October 27, 2001</p>
Rules of Pesticide Administration	<p>Effective Date: May 8, 1997</p> <p>First Amendment Date: November 29, 2001</p>
Regulations on the Protection of New Varieties of Plants	<p>Effective Date: October 1, 1997</p>
Regulation on the Protection of Layout-Design of Integrated Circuits	<p>Effective Date: October 1, 2001</p>
Implementing Regulations on Patent Law	<p>Effective Date: July 1, 2001</p> <p>First Amendment Date: December 28, 2002</p>
Regulation on Computer Software Protection	<p>Effective Date: January 1, 2002</p>
Management Regulations of Audio and Video Products	<p>Effective Date: February 1, 2002</p>
Regulations on Protection of the Olympic Symbols	<p>Effective Date: April 1, 2002</p>
Implementing Regulations on the Copyright Law	<p>Effective Date: September 15, 2002</p>

Implementing Regulations on Trademark Law	Effective Date: September 15, 2002
Regulations for the Implementation of Drug Administration Law	Effective Date: September 15, 2002
Regulations on the Custom Protection of Intellectual Property	Effective Date: March 1, 2004
Regulations on Administration of Veterinary Drugs	Effective Date: November 1, 2004
Interpretations by the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuratorate on Several Issues of Concrete Application of Laws in Handling Criminal Cases of Infringing Intellectual Property	Effective Date: December 22, 2004
Regulations on Copyright Collective Administration	Effective Date: March 1, 2005
Implementation Rules for the Regulations Regarding the Protection of New Varieties of Plants (Agriculture Part)	Effective Date: June 16, 1999
Implementation Rules for the Regulations Regarding the Protection of New Varieties of Plants (Forestry Part)	Effective Date: August 10, 1999

Implementation Rules for the Regulations on Integrated Circuit Design Protection	Effective Date: October 1, 2001
Management Measures of Wholesale, Retail, and Rent of Audiovisual Production	Effective Date: April 10, 2002
Management Measures of Audiovisual Production Import	Effective Date: June 1, 2002
Provisions for Identification and Protection of Well-known Trademarks	Effective Date: June 1, 2003
Procedures for the Registration and Administration of Collective Marks and Certification Marks	Effective Date: June 1, 2003
Measures on Patent Agency Administration	Effective Date: July 15, 2003
Measures on Compulsory Licensing of Patents	Effective Date: July 15, 2003
Measures for the Enforcement of Copyright Administrative Penalty	Effective Date: September 1, 2003
Measures for the Implementation of Regulations Governing Customs Protection of Intellectual Property	Effective Date: July 1, 2004

Sumber: Zhang (2006)

Intellectual Property sangat dilindungi secara konstitusional. Dewan negara telah mengumumkan undang-undang tersebut kepada departemen lain untuk melindungi hak kekayaan intelektual termasuk hukum paten, hukum hak cipta, hukum merek dagang, peraturan tentang perlindungan varietas tanaman yang baru, dll. Departemen administratif yang relevan juga telah memberlakukan peraturan yang sesuai dengan peraturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu beberapa hukum perdata Tiongkok, hukum pidana maupun undang-undang perdagangan luar negeri dan interpretasi yudisial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung sudah mencakup peraturan khusus tentang perlindungan IP (Mansur, 2005).

Pada beberapa tahun terakhir, SIPO di semua tingkat telah memperkuat sistem peraturan hukum sebagai tindakan tegas pemerintah terhadap pelanggaran hak paten khususnya hak paten makanan dan obat-obatan. Pada bulan Agustus 2004, SIPO¹ (*State Intellectual Property Office*) menerbitkan "Program Kerja dalam Memperkuat Penegakan Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Meluncurkan Kampanye Penegakan Hukum Khusus." Pada akhir tahun, kantor-kantor daerah telah memeriksa 10.251 tempat industri dan memeriksa 2.081.537 barang komoditas. Di antara 12.058 kasus pelanggaran paten yang ditangani oleh pemerintah pada akhir tahun 2004, lebih dari 86% berhasil diselesaikan. (Zhang, 2006)

¹ Lembaga yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan aplikasi paten asing dan domestik, mendaftarkan desain tata letak semikonduktor berdasarkan Undang-Undang Paten Republik Rakyat Tiongkok.

Sebagai upaya untuk menangani kasus yang melibatkan keberatan dan perselisihan mengenai kepemilikan merek dagang dan juga pengelolaan merek dagang, SAIC² (*State Administration on Industry and Commerce*) telah memberi sertifikasi dan menawarkan perlindungan kepada 153 merek dagang terkenal pada tahun 2004, 28 di antaranya merupakan nama merek perusahaan asing. Pada tahun 2004, sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan mengenai perlindungan IP, SAIC atas hak penggunaan eksklusif merek dagang terdaftar meluncurkan tiga kampanye khusus yang berfokus pada perlindungan merek dagang terhadap asing dalam menangani pelanggaran merek dagang makanan dan obat-obatan. Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2004, organisasi pemerintah Tiongkok menyelidiki dan menangani 51.851 kasus pelanggaran hukum yang melibatkan merek dagang di antaranya 5.494 merek dagang asing yang bersangkutan meningkat 1,6 kali lipat dibandingkan tahun 2003. (Zhang, 2006).

² Lembaga yang memegang otoritas atas pendaftaran merek dagang dan penegakan merek dagang, nama dagang dan perlindungan indikasi geografis khusus sesuai dengan Hukum Merek Dagang Republik Rakyat Tiongkok

3.1.2 Peran SIPO (*State Intellectual Property Office*) Dalam Melindungi *Intellectual Property*.



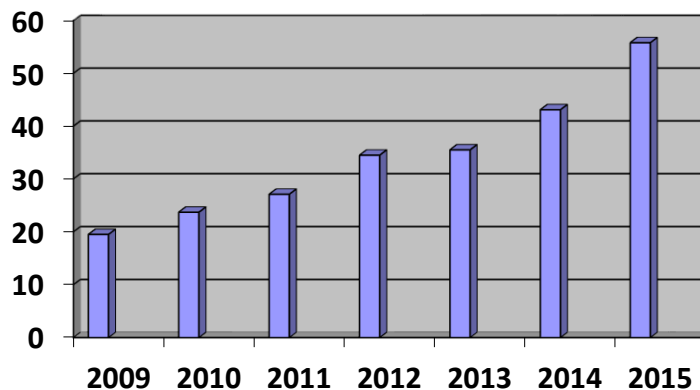
Gambar 3.1 : Lambang SIPO (*State Intellectual Property Office*) Republic Of Tiongkok

Selain aturan hukum yang berlaku mengenai IP, pemerintah Tiongkok juga memiliki beberapa badan regulasi untuk menangani banyaknya kasus pelanggaran IP yang semakin meningkat. Salah satu badan regulasi pemerintah tersebut adalah SIPO (*State Intellectual Property Office*). Badan bentukan pemerintah Tiongkok ini SIPO (*State Intellectual Property Office*) memiliki peran untuk bertanggung jawab atas pemeriksaan aplikasi paten asing dan domestik, mendaftarkan desain tata letak semikonduktor berdasarkan Undang-Undang Tiongkok, serta mengkoordinasikan isu hak kekayaan intelektual terkait dalam negeri yang melibatkan hak cipta, merek dagang dan hak paten (<http://www.wipo.int>).

Tugas SIPO dikatakan cukup berat mengingat bahwa program percepatan pembangunan dalam negeri pemerintah Tiongkok berpondasikan pada sistem perlindungan IPR yang kuat. Pemerintah Tiongkok telah semakin mengintensifkan

perlindungan IPR dan mencapai kemajuan yang luar biasa. dalam perundang-undangan, persetujuan dan registrasi, penegakan hukum, mekanisme dan pengembangan kapasitas, publisitas, pendidikan dan pelatihan dan kerja sama internasional.

SIPO memiliki peran yang penting dalam setiap pembentukan peraturan undang – undang mengenai IP. Untuk meningkatkan keefektifan kinerja SIPO bekerja sama dengan LAO dalam tinjauan legislatif mengenai rancangan peraturan tentang penemuan layanan (untuk pemeriksaan) dan peraturan departemen yang dimodifikasi seperti tindakan terhadap penegakan administratif paten. Langkah-Langkah mengenai pengelolaan *commissioning* Paten, dan tindakan mengenai penyeteroran mikroorganisme untuk tujuan prosedur paten. Untuk membentuk suatu aturan hukum yang kuat, SIPO terus memperbaiki mekanisme evaluasi sosial untuk perlindungan HKI dan melaksanakan survei tahunan tentang kepuasan sosial atas perlindungan HKI. Hal ini mengatur revisi mengenai pedoman operasi penegakan hukum administrasi paten, terus diperbaiki meliputi administrasi paten, penegakan hukum dan mekanisme kerja sama transaksional serta membentuk mekanisme konsultasi penghakiman pelanggaran paten yang tepat (SIPO Annual Report 2015)

Grafik 3.1 : Peningkatan Hak Paten di Tiongkok 2009 – 2015

Sumber : SIPO Annual Report 2015

Berdasarkan gambar tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya perusahaan yang mendaftarkan hak paten produknya semakin meningkat tiap tahun. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2015 dimana terjadi lonjakan peningkatan begitu pesat, hal ini bisa dikatakan sebagai keberhasilan SIPO sebagai badan regulasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal. Pendaftaran terkait hak paten meningkat dengan cepat hingga mencapai angka 2.799.000, dengan kenaikan per tahun sebesar 18,5%. Terlebih lagi ada 1.102.000 penerapan paten terhadap penemuan aplikasi, melebihi 1 juta untuk pertama kalinya. Kenaikan sebesar 18,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya meliputi 1.128.000 aplikasi untuk model paten utilitas dan 569.000 aplikasi untuk paten desain, masing - masing tercatat kenaikan tahunan sebesar 29,8% dan 0,8%

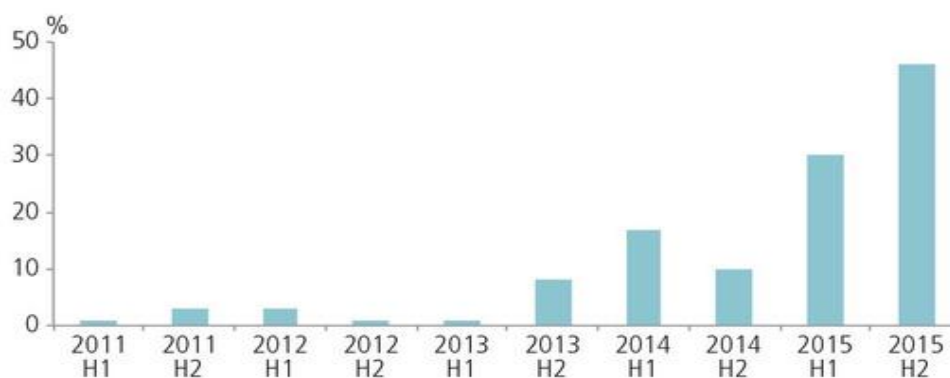
3.1.3. Kasus Pelanggaran *Intelelectual Property* Meningkat

Tiongkok sebagai negara tujuan pasar global terbesar banyak sekali perusahaan berinvestasi besar, sebanyak 14.000 perusahaan baru terdaftar setiap hari di Tiongkok berdasarkan Indeks Inovasi *Global 2017 World*

Intellectual Property Organization, dimana Tiongkok berada di peringkat 22 secara keseluruhan dan menduduki peringkat 1 di antara ekonomi berpenghasilan menengah (the diplomat.com) dengan banyaknya perusahaan yang masuk ke Tiongkok berdampak pada tingkat rawannya pelanggaran IPR terjadi.

Stereotip Tiongkok sebagai negara penghasil barang palsu diperkuat dengan meningkatnya berbagai kasus pelanggaran IPR, salah contoh terkenal toko Apple palsu di kota-kota Tiongkok seperti Kunming dan Shenzhen, yang dirancang untuk meniru lokasi ritel resmi sehingga beberapa karyawan bahkan mengira mereka bekerja untuk Apple. Di industri otomotif, penampilan Landwind X7 Tiongkok hampir tidak dapat dibedakan dari Range Rover Evoque, sementara produsen Tiongkok, *Chery's QQ* dimodelkan begitu dekat dengan Chevrolet Spark sehingga sangat sulit sekali dibedakan dengan yang asli.

Grafik 3.2. : Grafik Peningkatan *Intellectual Property* di Tiongkok 2011 - 2015



Sumber: Zhang (2006)

Meskipun masih banyak terjadi kasus pelanggaran IPR, dapat diimbangi dengan tindakan pemerintah Tiongkok untuk melindunginya, hal ini ditunjukkan dalam beberapa kasus tiga tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan kesadaran dan menurunnya tingkat pelanggaran IPR. Sebagai contohnya undang-undang merek dagang yang menelan biaya Apple \$ 60 juta telah diperbarui pada tanggal 1 Mei 2014 untuk menolak klaim atas merek dagang perusahaan yang dikenal dan untuk menghukum pelanggar merek dagang (www.ip-watch.org).

Penegakan IP di Tiongkok mengalami transformasi besar. Pengadilan Tiongkok menangani lebih dari 130.000 kasus IPR pada tahun 2014, meningkat 20 persen dari tahun sebelumnya. Menanggapi meningkatnya volume kriminalitas IPR ini, pemerintah Tiongkok mendirikan tiga pengadilan IPR khusus di Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Sejak dibentuknya pengadilan khusus IPR, ketiga pengadilan ini sendiri telah memproses lebih dari 30.000 kasus. Tidak hanya itu saja pemerintah Tiongkok juga memberikan subsidi tunai hingga \$4.500 kepada penerima paten untuk mendorong inovasi dalam negeri.

3.2. Upaya Tiongkok Melindungi *Intellectual Property* Secara Eksternal

Untuk mewujudkan kondisi yg aman bagi investor terkait keamanan IPR perusahaan mereka, upaya yang dilakuka Tiongkok dengan memproteksi IPR dari tindakan kriminal tidak hanya dilakukan sebatas berupa tindakan internal saja, melainkan begitu juga dengan tindakan eksternal. Salah satu upaya tersebut

diwujudkan dengan masuknya Tiongkok sebagai salah satu anggota dari WTO dan ikut serta mendandatangani perjanjian TRIPS, dimana perjanjian ini berisi mengenai aspek perdagangan hak kekayaan intelektual. Selain pencapaian besar dengan masuk dalam anggota WTO, Tiongkok juga menjalin kerjasama dengan AS guna mengawasi akan tingkat pelanggaran IPR yang terjadi.

Karena tingkat keparahan pelanggaran IPR, departemen manajemen administrasi hak cipta Tiongkok telah memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran hak cipta dan pembajakan. Sementara itu meningkatkan kerja sama dengan departemen pemerintah lainnya, seperti National Office of Rectification and Standardization of Economic Order (NORSMEO) di bawah Kementerian Perdagangan, otoritas bea cukai, Kementerian Keamanan Publik, Kejaksaan, Biro Pers dan Publikasi dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun 2004 telah terjadi 9.691 kasus pelanggaran, diantaranya ada sekitar 9.497 kasus dapat diselesaikan dengan menjatuhkan hukuman berupa sanksi administratif kepada pelanggar pada 7.986 kasus. Pada tahun yang sama, 555.368 kali melakukan inspeksi terhadap bisnis audio-video dilakukan di seluruh negara. SCB menyita 154 juta kopi audio-video ilegal. SCB menghancurkan 63.35 juta salinan ilegal produk tersebut selama kuartal pertama tahun 2005. (Becker, 1968)

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Tiongkok untuk membantu masyarakatnya memahami bahwa perlindungan IPR yang kuat akan mendorong pembangunan ekonomi dengan 1) mempromosikan inovasi dalam negeri dengan melindungi pengembangan teknologi yang baru (2) mencegah *brain drain* dengan

memastikan inovator dihargai atas usaha mereka; dan (3) inovasi teknologi, seperti investasi asing langsung, perizinan, dan impor.

Selain itu, sangat penting bagi orang-orang Tiongkok untuk menyadari bahwa pembajakan mungkin diinginkan dalam jangka waktu pendek namun tidak mendukung perkembangan inovasi teknologi. Orang-orang Tiongkok harus menyadari bahwa pembajakan berpotensi mengakibatkan kerugian jangka panjang melalui penurunan perkembangan inovasi terbaru dan ketidakmampuan untuk membuat suatu inovasi teknologi baru (Zhang, 2006).

Penjelasan lain untuk pelanggaran IPR yang terus menyebar luas di Tiongkok adalah kurangnya lembaga penegakan pusat. Kekuasaan dilusi dan yurisdiksi yang tumpang tindih antar instansi menghambat penegakan hukum IPR yang efektif. LV Wei, Deputi Bidang Teknologi dan Ekonomi Pusat Penelitian dan Pusat Penelitian Negara Bagian, menunjukkan bahwa fungsi berbagai lembaga penegak hukum saat ini tumpang tindih, membuang-buang sumber daya publik yang berharga. Sementara itu, dia juga menunjukkan bahwa pembagian kategoris otoritas masing-masing instansi mau tidak mau mengakibatkan kebingungan tentang proses penegakan hukum.

3.2.1. Perjanjian TRIPS

TRIPS adalah bagian dari perjanjian perdagangan multilateral yang dibuat mengikat para anggota dalam babak final Putaran Uruguay. Mengikuti perjanjian TRIPS adalah wajib bagi semua negara yang ingin bergabung dengan WTO, dan merupakan bagian dari kerangka kerja kelembagaan umum yang ditetapkan di bawah WTO. Perjanjian ini mencakup semua hak IP, paten, trade mark, hak cipta,

rahasia dagang, termasuk hak yang relatif baru (Susan,2003). Awal terbentuknya perjanjian TRIPS terjadi ketika rapat anggaran tahunan anggota WIPO pada tahun 1998 – 1999. Dalam rapat tersebut direktur jenderal tuan rumah membuat suatu langkah yang besar. Mengingat isu-isu dan masalah kekayaan intelektual semakin terintegrasi dengan isu-isu global lainnya serta kerja sama internasional di lapangan tidak dapat lagi dilakukan secara terpisah dari lingkungan kebijakan yang lebih luas. Aspek terkait perdagangan dari hak kekayaan intelektual yakni perjanjian TRIPS muncul ditandai dengan hak kekayaan intelektual sebagai masalah dalam negosiasi perdagangan multilateral. Demikian pula, isu-isu kekayaan intelektual telah diperdebatkan tentang perlindungan dan eksploitasi sumber daya keanekaragaman hayati, pada pengembangan dan alih teknologi (Shahid,2000).

Kebanyakan negara-negara maju memilih perjanjian umum tentang arus lalu lintas perdagangan (GATT) sebagai forum untuk negosiasi TRIPS. Negara-negara maju menganggap GATT sebagai tempat yang tepat untuk menegosiasikan hak kekayaan intelektual, karena mereka dapat menggunakan GATT sebagai forum negosiasi untuk akses produk negara berkembang ke pasar mereka dengan imbalan perlindungan hak kekayaan intelektual (correa and yussuf,1998)

Perjanjian ini benar-benar bertujuan untuk mengarahkan pada kestabilan agar tidak terjadi hak monopoli dalam suatu rezim hak kekayaan intelektual dan keinginan untuk menciptakan perdagangan bebas antar negara. Namun pada dasarnya efektivitas keberhasilan pelaksanaan rezim akan ditandai dengan kepatuhan anggota dalam mematuhi prinsip dan standar rezim hak kekayaan intelektual yang sudah diselaraskan berdasarkan perjanjian TRIPS. Dengan adanya

TRIPS diharapkan Tiongkok mentaati aturan secara langsung dan harus menyesuaikan peraturan yang sudah ditetapkan mengenai perlindungan IPR itu sendiri.

Cara Tiongkok menghindari perang dagang dan menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri Tiongkok pada akhirnya menyetujui Memorandum of Understanding (MOU) tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual pada Januari 1992 (Endeshaw,1996). Untuk mematuhi MOU ini, Tiongkok mengubah undang-undang paten, merek dagang hukum dan disahkan undang – undang persaingan tidak sehat untuk melindungi rahasia bisnis. Tiongkok juga setuju untuk bergabung dengan Konvensi Berne dan Konvensi Jenewa, yang dilakukan pada 15 Oktober, 1992, dan September 1993.

Namun dilain sisi masuknya Tiongkok kedalam WTO ternyata belum membuat praktek pembajakan dari negara tersebut berhenti. A.S sebagai negara produsen barang dengan aktivitas produksi yang tinggi merupakan salah satu pasar bagi penjualan barang imitasi dari Tiongkok. A.S mengklaim beberapa negara yang menjadi produsen barang bajakan yang masuk ke negaranya yaitu Tiongkok, Rusia, India, Brazil, Indonesia, Vietnam, Taiwan, Pakistan, Turki dan Ukraina (Teresko, seperti dikutip dalam Lewis, 2009). Dari daftar tersebut Tiongkok dianggap sebagai negara pelanggar terburuk. *U.S Customs* pada tahun 2006 menyatakan bahwa sebanyak 80% barang bajakan yang disita oleh petugas bea cukai AS merupakan barang bajakan yang berasal dari Tiongkok (Blanchard,Lewis,2009). Hal ini telah dianggap meresahkan AS karena menimbulkan resiko bagi para konsumennya.

Melihat pada fenomena ini menarik untuk dilihat karena seperti yang dibahas sebelumnya bahwa sebagai negara yang berpengaruh langsung dalam bidang ekonomi, AS harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan sektor ekonominya. Munculnya pesaing dari produk bajakan yang berasal dari Tiongkok menjadi isu sensitif dari warga negaranya karena merugikan masyarakat umum sebagai pembayar pajak dan juga produsen barang asli yang produknya dipalsukan.

3.2.2. Kerjasama Internasional Dengan A.S

3.2.2.1 Pemerintahan Barack Obama

Tiongkok telah berkembang menjadi salah satu pasar pertumbuhan terpenting di dunia, dan telah menjadi mitra dagang terbesar kedua di AS setelah Kanada. Sebagai salah satu aspek penting akses WTO, Tiongkok berkomitmen untuk mematuhi persyaratan dari perjanjian terkait perdagangan WTO (TRIPS) yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Namun, pelanggaran HKI di Tiongkok termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan rahasia dagang-tetap menjadi perhatian utama dalam hubungan perdagangan bilateral A.S.-Tiongkok.

Hubungan AS – Tiongkok pada masa periode pemerintahan Obama dapat dikatakan cukup berjalan dengan baik mengingat kedua negara merupakan mitra dagang yang dekat. Namun isu akan pelanggaran hak kekayaan intelektual belakangan ini sedikit membuat keretakan akan kepercayaan AS terhadap Tiongkok. Banyak sekali perusahaan dari berbagai negara yang melakukan investasi di Tiongkok mengeluhkan akan pelanggaran IPR dan salah satunya adalah A.S. Presiden Barack Obama pada akhirnya memutuskan menangani masalah ini

dengan membuat perjanjian IPR atau *Intellectual Property Right Agreemeent* agar arus perdagangan A.S – Tiongkok berjalan semestinya dan meningkatkan stabilitas perekonomian dalam negeri.

Tiongkok dan A.S telah sepakat melakukan kerjasama dengan menandatangani perjanjian IPR atau *Intellectual Property Rights Agreement*. Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok ("Para Pihak") setuju untuk mengembangkan kerangka kerja komprehensif untuk hak atas kekayaan intelektual ("HKI"). Berikut beberapa kesepakatan dalam perjanjian antara kedua negara A.S dan Tiongkok terkait *Intellectual Property* sebagai berikut 1) membantu memperbaiki lingkungan untuk perlindungan dan penegakan HKI di wilayah masing-masing pihak, 2) Menciptakan lingkungan hukum dan bisnis yang mendukung inovasi melalui kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi, mendukung persaingan pasar, perlindungan dan penegakan HKI yang kuat, dan tidak melibatkan pemerintah dalam keputusan bisnis perusahaan, 3) Saling memperdalam pemahaman masalah kekayaan intelektual, 4) Mengembangkan lingkungan yang mempromosikan investasi dan pembangunan ekonomi, 5) Membuat keuntungan bagi konsumen dan pemegang IPR, 6) Mempromosikan pengembangan hubungan bilateral bilateral A.S-Tiongkok yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Isi atau komponen utama dari perjanjian kedua bealh pihak meliputi poin – poin sebagai berikut 1) Terlibat dalam bantuan teknis dan pengembangan kapasitas: Kerjasama dalam kerangka kerja harus mempromosikan seminar, simposium, lokakarya, studi, dan bentuk kolaborasi lainnya yang melibatkan badan-badan A.S.

dan kementerian dan kantor Tiongkok yang terlibat dalam isu-isu HKI, 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang IP. Program di bawah Kerangka Kerja harus berupaya meningkatkan kesadaran dan rasa hormat masyarakat terhadap HKI melalui kegiatan bersama dan bentuk kerjasama lainnya, 3) Mendorong keterlibatan lokal: Koordinator Kerangka Kerja dan peserta lainnya dalam kerangka kerja di tingkat pemerintah pusat atau federal harus berusaha untuk bekerja dengan instansi pemerintah dan entitas lainnya di tingkat provinsi, negara bagian, dan kota untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HKI di lingkungan tingkat sub-nasional, 4) Membina kolaborasi dengan universitas dan institusi akademis: Program di bawah kerangka kerja harus mendorong pertukaran informasi dan kegiatan kolaboratif lainnya di antara departemen IPR di universitas Tiongkok dan A.S maupun instansi Tiongkok - A.S yang bertanggung jawab atas isu-isu IPR 5) Mempromosikan pertukaran dengan peradilan, program di bawah kerangka kerja harus mempromosikan pertukaran yang melibatkan A.S. dan hakim Tiongkok untuk berbagi pengalaman dan informasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi peradilan Tiongkok dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan permasalahan IPR 6) Pertukaran legislative, program di bawah Kerangka harus dipromosikan pertukaran legislatif lebih lanjut antara pemerintah Tiongkok dan A.S., termasuk badan legislatif yang bertanggung jawab untuk menyusun peraturan undang-undang terkait IPR.

Perjanjian ini sendiri akan dilaksanakan pada tahun 2012 – 2017 dengan rincian para pihak terkait akan mengadakan pelatihan pada awal 2012 untuk membahas bantuan teknis dan pengembangan kapasitas. Pelatihan ini akan menginventarisasi

pelatihan yang diberikan Amerika Serikat ke Tiongkok, menganalisis di mana bantuan teknis dan pelatihan paling efektif dalam mencapai tujuannya, dan menilai area di mana bantuan teknis dan pelatihan tambahan sangat dibutuhkan. Pelatihan ini akan fokus membahas cara baru untuk memberikan bantuan teknis dan cara untuk melanjutkan hubungan antara pemerintah, mitra dagang maupun institusi akademis baru.

Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara dalam melindungi hak kekayaan intelektualnya. Sebagai contoh, negara adidaya seperti Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan ekspor maupun impor, AS mendirikan *United States Trade Representative* (USTR) yang bertanggungjawab untuk mengelola dan mengkoordinasi perdagangan, komoditas, dan investasi internasional milik AS. USTR itu sendiri dipimpin oleh perwakilan dagang AS, anggota kabinet yang menjadi penasihat perdagangan untuk presiden, negosiator, dan juru bicara isu perdagangan A.S (USTR, n.d.).

3.2.2.2 Pemerintahan Donald Trump

Tahun 2017 merupakan menjadi tahun perubahan bagi warga A.S, karena pada tahun ini A.S resmi menjadikan Donald Trump sebagai presiden dengan mengalahkan Hillary Clinton. Selama masa kampanyenya Donald Trump memiliki beberapa kebijakan yang cukup riskan salah satunya yakni pembangunan tembok di perbatasan Meksiko untuk mengurangi kasus pengedaran narkoba yang sebagian besar berasal dari imigran dari negara tersebut. Bahkan yang paling kontroversial lainnya Donald Trump menolak imigran maupun muslim yang tinggal di A.S. Latar belakang Trump sebagai seorang pengusaha dan pebisnis menjadikan Tiongkok

sebagai fokus kebijakan era pemerintahannya. Pembatasan kuota ekspor dan pelanggaran IPR di Tiongkok yang terus meningkat membuat A.S bersikap tegas dalam mengambil kebijakan.

Tiongkok menerapkan undang-undang, kebijakan dan melakukan tindakan yang merugikan kekayaan intelektual perusahaan – perusahaan A.S di Tiongkok. Seharusnya perusahaan ini mendapatkan imbalan yang sesuai dengan inovasi namun justru tindakan yang dilakukan Tiongkok justru membuat kerugian yang cukup besar dan berpengaruh bagi perekonomian A.S. Untuk dapat berbisnis di Tiongkok perusahaan – perusahaan A.S diminta untuk melakukan usaha gabungan dengan perusahaan lokal praktik ini secara tidak langsung membuat perusahaan Tiongkok mendapatkan inovasi dari perusahaan A.S (<https://www.whitehouse.gov>). Kerugian yang diderita A.S akibat pencurian kekayaan intelektual terhadap perekonomian diperkirakan mencapai \$ 600 miliar per tahun. Pencurian semacam ini tidak hanya merusak perusahaan-perusahaan Amerika, namun juga mengancam keamanan nasional.

Sebelum masa pemerintahan Trump A.S sudah melakukan perlindungan yang ketat terhadap produk-produk dari dalam negerinya tetap saja negara lain dapat memiliki celah untuk meniru dan bahkan memproduksi inovasi tersebut. Salah satu negara yang memiliki tingkat produktifitas tinggi dalam bidang industri dan juga merupakan salah satu negara dengan tingkat pembajakan barang bermerek yang tinggi adalah Tiongkok (Yuristia & Cahya, 2014), maka secara otomatis mereka memiliki kewajiban untuk mentaati aturan organisasi perdagangan dunia tersebut.

Upaya A.S untuk melindungi kepentingan nasional mereka atas Tiongkok direalisasikan dengan kontrol yang diberikan oleh A.S menggunakan representasi dagang mereka yaitu USTR terhadap Tiongkok. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, USTR memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengkoordinasi perdagangan internasional, komoditas, dan kebijakan investasi langsung dari A.S. Didalamnya USTR diisi oleh negosiator dan juru bicara terkait isu perdagangan. USTR menyiapkan negosiator perdagangan dengan tujuan untuk mempromosikan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka di seluruh dunia (White House, 2015).

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa beberapa diplomasi yang dilakukan oleh A.S di Tiongkok tidak semuanya berhasil. Khusus bagi permasalahan dagang dengan Tiongkok, Beijing tidak menawarkan beberapa konsesi atas beberapa kasus dengan A.S. Beberapa kasus yang melibatkan kedua negara memang membuat Tiongkok berkomitmen untuk melakukan perjanjian tertulis (Zeng, 2004). Diplomasi koersif yang dilakukan oleh A.S memang untuk menekan Tiongkok untuk mematuhi tuntutan yang diberikan oleh A.S, namun Tiongkok mengetahui bahwa kepentingan dari A.S di Tiongkok juga membuat Tiongkok memiliki posisi tawar karena tidak mungkin A.S memberikan ancaman yang beresiko merugikan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan Tiongkok mengetahui bahwa A.S akan sangat berhati-hati dalam menjalankan praktek diplomasi koersif mereka agar tidak sampai terjadi konflik yang serius. Hal ini dikarenakan apabila sampai terjadi konflik maka A.S yang memiliki saham yang cukup tinggi di Tiongkok akan menderita kerugian besar.

3.3 Perseteruan A.S – Tiongkok Terkait *Intellectual Property*

3.3.1 Gugatan A.S Terhadap Tiongkok

Meskipun sudah bergabung dengan WTO dan menyetujui perjanjian TRIPS dimana didalamnya memuat mengenai peraturan hukum dan perlindungan IPR namun tetap saja masih terjadi pelanggaran yang dilakukan Tiongkok. A.S akhirnya melakukan gugatan terhadap Tiongkok terkait pelanggaran yang dilakukan terhadap perjanjian *TRIPS pasal 9, 41, 46, 59, 61 Konvensi Berne* pada tahun 2008.

Gugatan yang diajukan A.S meliputi hukum pidana Tiongkok dan putusan mahkamah agung yang memberikan ambang batas untuk prosedur tindak kriminal dan hukuman atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Tidak hanya itu saja yang kedua mengenai peraturan Tiongkok untuk perlindungan bea atas hak kekayaan intelektual dan barang – barang yang dianggap melanggar pihak bea Tiongkok akan disita bahkan dibuang. Dan gugatan yang terakhir mengenai undang – undang hak cipta dimana Tiongkok menolak perlindungan dan penegakan untuk karya – karya yang belum diberi izin untuk diterbitkan atau didistribusikan ke Tiongkok.

Berdasarkan kasus tersebut tindakan bea cukai dianggap melanggar TRIPS pasal 51 – 60 berlaku batasan untuk ekspor. Sehubungan dengan impor melelang barang tidak dilarang dalam pasal 59, namun cara yang dilakukan Tiongkok dalam melelang barang tidak sesuai dengan pasal 59 hal ini dikhawatirkan terjadi penjualan barang setelah penghapusan merek dagang. Kemudian untuk TRIPS pasal 9.1 (Konvensi Berne pasal 5(1) dan 17) dan TRIPS pasal 41.1 (penegakan kewajiban umum) disini dijelaskan bahwa Tiongkok berhak melarang peredaran dan pameran karya yang tercantum dalam pasal 17 Konvensi Berne. Namun tidak

dibenarkan adanya penolakan atas perlindungan semua hak cipta dalam pekerjaan apapun. Kegagalan Tiongkok untuk melindungi hak cipta atas karya terlarang (dilarang karena konten ilegal mereka) oleh karena itu tidak sesuai dengan pasal 5 (1) Konvensi Berne yang tergabung dalam pasal. 9.1, serta dengan pasal. 41.1, karena hak cipta atas karya terlarang tidak dapat ditegakkan. Penjelasan terakhir TRIPS pasal 61 yakni tindakan Tiongkok mengecualikan beberapa pelanggaran hak cipta dan merek dagang dari tanggung jawab pidana dimana pelanggaran tersebut berada di bawah ambang batas berdasarkan jumlah omset, keuntungan, penjualan atau salinan barang yang melanggar. Fakta ini saja tidak cukup bisa diproses secara hukum karena pada pasal 61 tidak mengharuskan anggota untuk mengkriminalkan semua hak cipta dan merek dagang.

3.3.2 Penolakan Tiongkok Terhadap Tuduhan A.S Tekait *Intellectual Property*

Pelanggaran hak kekayaan Intelektual yang telah dilakukan oleh Tiongkok berulang kali membuat A.S geram. Pada kasus sebelumnya yang terjadi tahun 2008 silam dimenangkan oleh pihak A.S. Perwakilan Dagang A.S Peter Allgeier mengumumkan bahwa sebuah penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menemukan aspek penting dari rezim hak kekayaan intelektual Tiongkok (HKI) karena tidak sesuai dengan kewajiban Tiongkok berdasarkan persetujuan WTO mengenai aspek terkait perdagangan hak kekayaan intelektual (Perjanjian TRIPS). Amerika Serikat menuntut Tiongkok karena kekhawatiran serius tentang beberapa kekurangan dalam rezim hukum Tiongkok yang melindungi dan memberlakukan hak cipta dan merek dagang pada berbagai produk (www.ustr.gov). Dalam kasus ini penolakan Tiongkok terhadap perlindungan hak

cipta atas karya-karya yang tidak sesuai dengan standar pengkajian konten Tiongkok tidak diperbolehkan berdasarkan perjanjian TRIPS.

Gugatan demi gugatan dilancarkan A.S ke Tiongkok yang merupakan bentuk dari tindakan protes A.S terkait masalah transfer teknologi perusahaan yang melakukan investasi di Tiongkok. Pihak A.S menuduh Tiongkok melakukan pencurian kekayaan intelektual kelompok bisnis dan perdagangan A.S berselisih mengenai bagaimana pemerintah harus bertindak melawan apa yang mereka yakini sebagai pencurian kekayaan intelektual oleh Tiongkok, dengan beberapa mendorong tindakan sepihak dan yang lainnya percaya bahwa pemerintah A.S harus bekerja sama dengan negara lain untuk mendorong Tiongkok untuk menangani masalah tersebut (<http://www.globaltimes.cn>). Pihak pemerintah Tiongkok menanggapi kasus ini dengan sambutan baik, bagi perusahaan AS untuk menyelesaikan keluhan mereka melalui jalur bilateral dan mengatakan bahwa tindakan sepihak oleh AS tidak akan membantu.

John Zhang selaku sekretaris jenderal Jaringan Transfer Teknologi Internasional yang berbasis di Beijing, mengatakan bahwa klaim AS tentang perusahaan yang diminta untuk mentransfer teknologi adalah gagasan yang sangat tidak jelas kebenarannya. Selama ini belum pernah ada kabar bahwa pemerintah daerah, yang berusaha keras untuk merayu perusahaan AS berteknologi tinggi untuk berinvestasi di kawasan industri mereka. Namun di sisi lain beberapa perusahaan teknologi kecil AS, yang datang ke Tiongkok untuk mencari investasi dapat dikatakan kemungkinan besar dihadapkan akan permintaan untuk

mengalihkan teknologi mereka. Tetapi inilah bagaimana kita melakukan bisnis di seluruh dunia, dan tidak ada yang salah dengan Itu.

3.4 Analisis

Berdasarkan teori liberal interdependensi yang menyebutkan modernisasi dapat meningkatkan ketergantungan antar negara dalam hal ini menyangkut dengan perkembangan hukum IP dan meningkatnya kesadaran masyarakat Tiongkok akan pentingnya hak paten.

Dapat kita lihat Tiongkok telah membuat langkah penting dengan meningkatkan perlindungan IP-nya. Tiongkok sekarang telah memberikan lebih banyak paten daripada negara lain yaitu lebih dari 1,6 juta pada tahun 2011. Sementara banyak yang merupakan paten utilitas atau kecil dan berkualitas rendah, proses pemberian paten mencerminkan langkah-langkah penting untuk menuju aturan hukum yang lebih berkembang (IP Commission Report, 2013). Tiongkok lebih banyak melakukan paten dari perusahaan besar sampai kecil daripada membuat inovasi baru. Para penagamat memperkirakan perombakan besar – besaran yang dilakukan Tiongkok dan ketika Tiongkok mulai memproduksi kekayaan intelektualnya sendiri dalam jumlah yang tidak signifikan, para pengusaha dan penemu negara itu sendiri akan menekan para pemimpin politik dan Partai Komunis untuk mengubah undang-undang dan meningkatkan perlindungan IP (USTR Special Report, 2012).

Presiden Xi Jinping pada pidatonya tahun 2017 menyerukan akan mempercepat perlindungan dan memberikan denda yang besar bagi pelaku pencuri

hak paten. Tiongkok memulai kampanye nasional untuk melindungi hak milik internasional perusahaan internasional. Kementerian Perdagangan mengatakan Tiongkok adalah negara berkembang dan tidak memiliki sistem yang sempurna untuk melindungi hak kekayaan intelektual, oleh karena itu masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan berjanji untuk melindungi hak-hak orang asing yang berinvestasi dalam perekonomian Tiongkok (Bloomberg).

Dapat kita lihat bahwa sikap Tiongkok dengan melakukan perombakan besar – besaran dalam meningkatkan perlindungan IP hanya untuk memperkuat perusahaan dalam negeri mereka. Modernisasi aturan hukum mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan strategi pasar agar perusahaan asing tidak takut dalam melakukan investasi. Peningkatan perlindungan hak paten dapat dikatakan sangat meningkat namun dalam sektor perlindungan rahasia dagang sangat kurang sekali, hal ini yang menjadikan hubungan kerjasama anatar A.S dan Tiongkok mengalami kendala.

Langkah besar Tiongkok dalam melindungi hak paten mendapatkan respon positif pada masa pemerintahan Obama. Pada pemerintahan Obama kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Presiden Obama dan Presiden Xi Jinping dari Tiongkok telah mengambil langkah konkret pertama mereka untuk bertindak tegas akan meningkatnya ancaman serangan *cyber* antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang berjanji bahwa pemerintah mereka akan menahan diri dari pencurian hak kekayaan intelektual berbasis komputer untuk keuntungan komersial bahkan Obama juga menyarankan bahwa ia mungkin masih memberlakukan sanksi bagi Tiongkok jika

hacking masih saja terjadi (nytimes.com). Obama memastikan bahwa pemerintah A.S tidak mendukung sama sekali segala bentuk *cybertheft* dan mengharapkan hal serupa diterapkan oleh pemerintah Tiongkok. Aturan internasional mengenai *cybertheft* masih kurang berkembang, kedua negara berupaya bekerjasama untuk meningkatkan keamanan dari ancaman pencurian kekayaan intelektual melalui internet ini (cnbc.com).

Untuk merespon kasus tersebut A.S pada masa pemerintahan Donald Trump bertindak tegas dengan menyatakan perang dagang dengan Tiongkok. Amerika Serikat berencana memberlakukan tarif atas produk-produk Tiongkok senilai US\$50 miliar, sebagai hukuman atas apa yang disebut pencurian rahasia perdagangan, termasuk piranti lunak software, hak paten dan teknologi lainnya. Menurut Kantor Dagang AS (USTR) di Gedung Putih, tarif sebesar 25 persen bakal diberlakukan kepada seluruh produk. Sebagian besar tarif akan membidik industri teknologi, permesinan dan kedirgantaraan Tiongkok. Yang lain akan membidik peralatan medis, obat-obatan dan material pendidikan seperti peralatan penjilidan buku (cnnIndonesia.com).

Hubungan interdependensi antara A.S dengan Tiongkok dalam kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dapat dikatakan kurang berhasil karena mengalami pasang surut cukup signifikan. Mengapa dapat dikatakan demikian dikarenakan sikap Tiongkok yang kurang konsisten dalam menjalin kerjasama. Meskipun persetujuan kerjasama telah disepakati kedua negara pada masa pemerintahan Obama pada tahun 2012 – 2017, sikap Tiongkok tetap saja tidak berubah dengan melakukan praktek pencurian inovasi terhadap AS. Meskipun

berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tiongkok dengan meningkatkan sistem hukum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual tidak merubah sikap AS yang melihat dengan fakta kasus pencurian inovasi masih saja terjadi.

Menurut penulis kerjasama kedua negara akan masalah perlindungan hak kekayaan intelektual masih bisa terjadi kembali mengingat sejarah hubungan kerjasama dagang AS dengan Tiongkok saling ketergantungan satu sama lain. AS sebagai negara investor yang cukup besar untuk perkembangan perekonomian Tiongkok sedangkan Tiongkok akan bergantung pada ekspor berbagai macam barang ke negara AS. Perseteruan tersebut sedikit menemukan titik terang ketika AS dan Tiongkok telah sepakat mengenai kerangka kerja untuk pembicaraan perdagangan, tetapi tidak diberitahukan apa saja kesepakatan perjanjian kedua negara yang memberikan rincian perjanjian. Sementara Trump mengatakan di akun Twiternya bahwa Tiongkok telah setuju untuk membeli sejumlah barang pertanian Amerika "MASIAL" untuk mengurangi surplus perdagangan yang meningkat dengan AS, kedua belah pihak tidak setuju pada angka dolar tertentu (Bloomberg).